

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Agustina, M. S. (2020). *Pertanggungjawaban Kepala Desa dan Peran Badan Permusyawaratan Desa*. Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, 36-57.
- Arifidiar, I. (2015). *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dengan Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Kabupaten Sambas)*. Mahasiswa S2 Hukum Untan, 1-31.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Siagian, S. P. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Solihin, I. (2009). *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Widjaja, H. (2003). *Otonomi Desa*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mulyani, S. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI.
- Rauf, Rahyunir., dan Sri Maulidiah. (2015). *Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Nusa Media.
- Siagian. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wijayanti, Irene Diana Sari. (2008). *Manajemen*. Yogyakarta: Mitra Cendikia Press.

Dokumentasi/Jurnal/Media Massa/Dan lain-lain:

- Andhika, R., & Pane, D. N. (2018). Pengaruh Komitmen Organisasi dan Pengawasan Terhadap Disiplin Kerja Karyawan pada PT Artha Gita Sejahtera Medan. 9(1), 95–103.
- Kushadajani, K., & Permana, I. A. (2020). Inovasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa: Peran Kepemimpinan Lokal dalam Perspektif Relasi Antar Aktor. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 70–80.
<https://doi.org/10.14710/jiip.v5i1.7318>

Mangoto, K. (2015). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 3.1. 1 (2016): 1160.

Pratama, A. K., Badaruddin, B., & Kadir, A. (2021). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa. *Perspektif*, 10(2), 371–382.
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4509>

Romli, O., & Nurlia, E. (2017). Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang). 3(1).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tahapan Penyaluran Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Bupati Magelang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.